

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM  
PENANGANAN FAKIR MISKIN (STUDI KASUS  
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI  
KECAMATAN MEDAN HELVETIA)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FEBIYOLANDA PUTRI**

**188520050**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)31/8/23

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM PENANGANAN FAKIR  
MISKIN (STUDI KASUS PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON  
TUNAI DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FEBIYOLANDA PUTRI**

**188520050**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)31/8/23

### LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin  
(Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan  
Medan Helvetia)

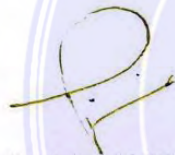
Nama : Febiyolanda Putri

NPM : 188520050

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

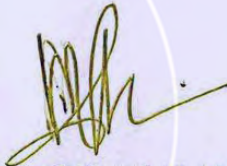
Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing



Dr. Adam M.AP

Pembimbing I



Marlina Deliana S.AB, M.AB

Pembimbing II



Dr. Effiati Hasibuan, M.Si

Dekan Fakultas Isipol



Isra'udinisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 4 Mei 2023

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 4 Mei 2023



Febiyolanda Putri

188520050



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febiyolanda Putri

NPM : 188520050

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Medan Helvetia)**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 4 Mei 2023

Yang menyatakan



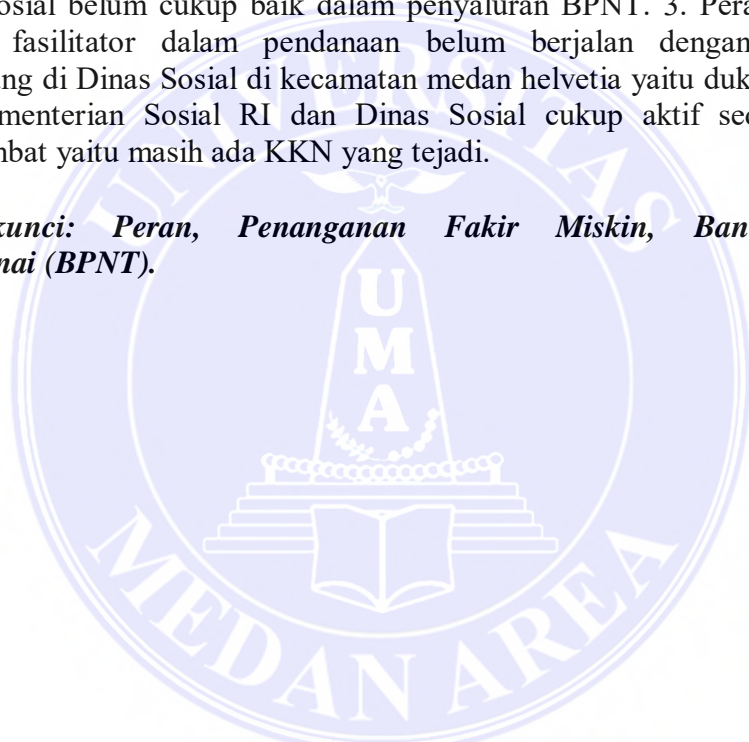
Febiyolanda Putri

188520050

## ABSTRAK

Permasalahan Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kota Medan adalah pendataan yang tidak sesuai, sehingga masyarakat miskin ada yang tidak mendapatkan bantuan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam menangani fakir miskin dan mengetahui faktor pendukung faktor penghambat peran Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori ini menggunakan teori peran Yusuf, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial kurang optimal, dibuktikan sebagai berikut: 1. Peran Dinas Sosial sebagai regulator cukup terlaksana dengan baik tetapi ada pendataan yang belum sesuai 2. Peran Dinas Sosial sebagai dinamisator Dinas Sosial belum cukup baik dalam penyaluran BPNT. 3. Peran Dinas Sosial sebagai fasilitator dalam pendanaan belum berjalan dengan baik. Faktor pendukung di Dinas Sosial di kecamatan medan helvetia yaitu dukungan finansial dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial cukup aktif sedangkan faktor penghambat yaitu masih ada KKN yang terjadi.

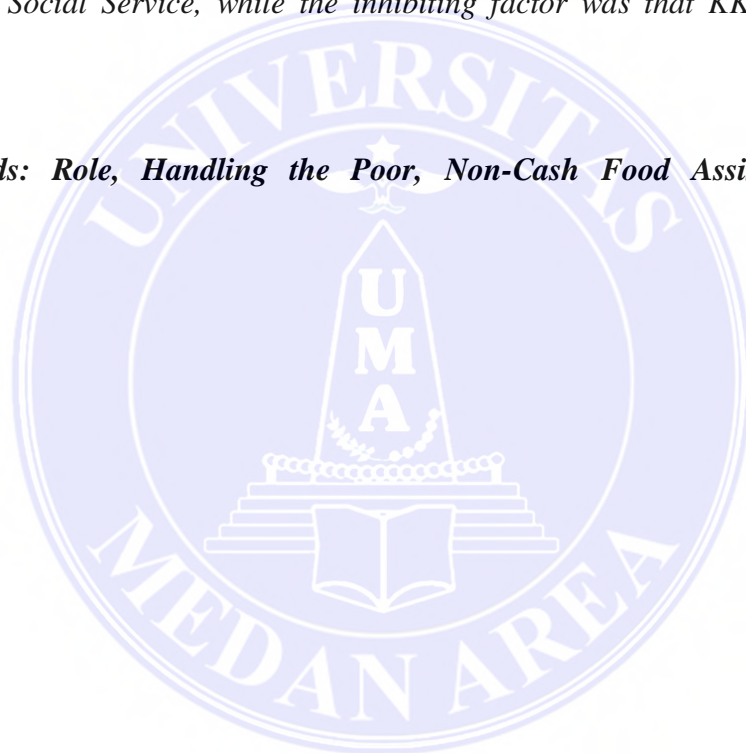
**Kata kunci:** *Peran, Penanganan Fakir Miskin, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).*



## **ABSTRACT**

*This study aimed to discover the role of Social Service in handling the poor and the supporting and inhibiting factors. This study employed qualitative methods, with observation, interviews, and documentation. The study's findings indicated that: 1. Their role as a regulator was well-implemented, but data collection was not yet appropriate. 2. Their role as a driving force was lacking in BPNT distribution. 3. Their as a financial facilitator was unsuccessful. Supporting factors included financial support from the Indonesian Ministry of Social Affairs and the Social Service, while the inhibiting factor was that KKN continued to occur.*

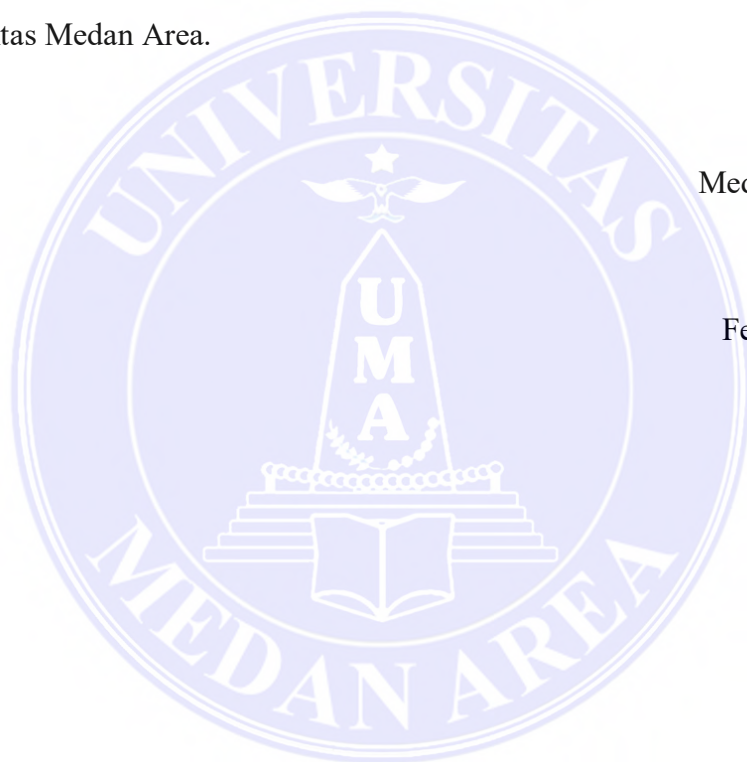
**Keywords:** *Role, Handling the Poor, Non-Cash Food Assistance (BPNT).*



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Febiyolanda Putri, anak dari Bapak Nazaruddin dan Ibu Yusnita, lahir di Medan pada tanggal 25 Februari 2000. Penulis merupakan anak tunggal.

Tahun 2018 penulis lulus dari SMA Swasta Kartika 1-2 Medan, pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



Medan, 4 Mei 2023

Febiyolanda Putri



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun Skripsi ini berjudul **“Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Medan Helvetia)”**.

Penulis menyadari Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari segi moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, M.AP selaku Sekretaris yang telah memberikan saran dan tanggapan terhadap skripsi ini.
7. Kepada orang yang paling saya sayangi dan paling berpengaruh dalam hidup saya, papa dan mama saya yang telah memberikan semangat serta motivasi, membiayai serta memberikan doa yang tiada henti demi keberhasilan masa depan saya.
8. Kepada Ibu Bungamin br. Surbakti selaku Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin serta pegawai di Dinas Sosial Kota Medan yang telah memberikan informasi yang saya butuhkan selama riset di Dinas Sosial Kota Medan.
9. Kepada Anggi Khairani Harahap yang selalu menemani saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan saya dari awal kuliah hingga di akhir kuliah ini, Nurmalinda, Fransiska, Anggi Yolanda Matondang, Agnes Carolina Sinaga, Mellynita Siringo-ringo, Febri Harahap, Marcelania br. Purba yang selalu memberikan saya motivasi serta semangat yang tak henti-hentinya selama penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman seangkatan 2018 prodi Administrasi Publik kelas C1 yang tidak bisa saya sebutkan nama nya satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada saya kurang lebih empat tahun bersama-sama menjalani perkuliahan di Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih ada kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis

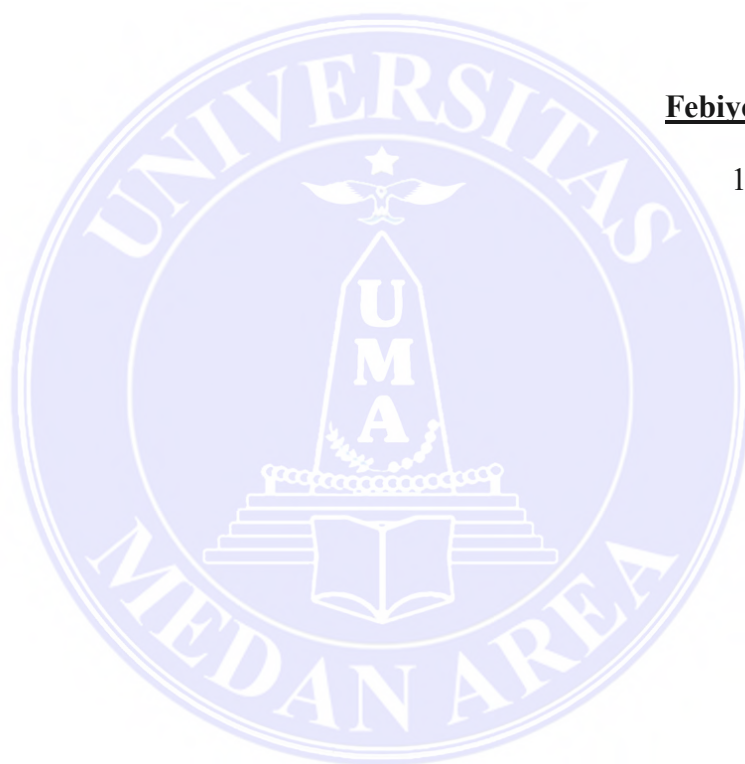
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi setiap pihak terutama bagi para pembaca.

Medan, 4 Mei 2023

Penulis

**Febiyolanda Putri**

188520050



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
I. LATAR BELAKANG .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Peran.....	7
2.2 Dinas Sosial Kota Medan .....	10
2.3 Pelayanan Publik.....	11
2.4 Fakir Miskin.....	13
2.4.1 Faktor Terjadinya Kemiskinan.....	14
2.5 Bantuan Pangan Non Tunai .....	15
2.6 Penelitian Relevan.....	17
2.7 Kerangka Pemikiran.....	18
III. METODE PENELITIAN .....	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
3.2.1 Tempat Penelitian.....	22
3.2.2 Waktu Penelitian .....	22
3.4 Informan Penelitian .....	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.6 Teknik Analisis Data .....	25
3.7 Definisi Konseptual.....	26
3.8 Definisi Operasional.....	28
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
4.1 Hasil .....	30
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	30
4.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan	31
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan.....	33
4.1.4 Struktur Organisasi.....	33
4.2 Pembahasan .....	42
4.2.1 Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin	42
4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat .....	58
4.2.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	59

V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	62
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
PEDOMAN WAWANCARA .....	66
LAMPIRAN .....	67





## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Batas Wilayah Kecamatan Medan Helvetia .....	3
2. Jumlah Masyarakat Miskin di Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2021 .	4
3. Penelitian Relevan .....	17
4. Jadwal dan Waktu Penelitian.....	22
5. Nama Pegawai ASN Dinas Sosial Kota Medan .....	39
6. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Medan Helvetia .....	43



## DAFTAR BAGAN

Halaman

1. Kerangka Pemikiran.....  
..... **Error! Bookmark not defined.**



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Wawancara dengan Ibu Bungaminbr. Surbakti selaku Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin.....	67
2. Foto bersama dengan Ibu Bungaminbr. Surbakti selaku Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin.....	67
3. Wawancara dengan Ibu Rizki Putri Amalia selaku Pegawai di Dinas Sosial Kota Medan. ....	68
4. Foto bersama dengan Ibu Rizki Putri Amalia selaku Pegawai di Dinas Sosial Kota Medan. ....	68
5. Foto bersama dengan Bapak Abdillah Harja Purba, S.STP, Msi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. ....	69
6. Foto bersama dengan Ibu Atik selaku masyarakat yang tidak menerima BPNT. ....	69
7. Wawancara dengan Ibu Siti Aminah selaku masyarakat penerima BPNT.....	70
8. Foto bersama dengan Ibu Siti Aminah selaku masyarakat penerima BPNT.....	70

# BAB I

## LATAR BELAKANG

### 1.1 Latar Belakang

Persoalan kemiskinan di Negara Indonesia sudah bukan hal yang baru lagi, dari awal kemiskinan sudah menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Permasalahan fakir miskin adalah agenda serius yang harus dihadapi pemerintah. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang mendasar seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan serta kesehatan yang layak.

Menurut BAPPENAS, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan ialah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Saat ini penanganan fakir miskin di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara yang termasuk salah satu kota dengan penduduk miskin yang relatif besar, karena menurut data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Medan mencapai 183.540 jiwa di tahun 2020. Maka dari itu, pemerintah berusaha membuat program untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang dapat memperkuat peran perekonomian rakyat. Kecamatan Medan Helvetia termasuk dalam penerima program yang dibuat pemerintah. Kecamatan Medan Helvetia merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Wilayah Kota Medan seluas ± 1.156.147 ha dan merupakan pecahan dari Kecamatan Medan Sunggal. Sebelum menjadi kecamatan final, terlebih dahulu melalui proses Distrik Perwakilan. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 138/402/K/1991 tanggal 5 Februari 1991 dan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 138/595/SK/1991 tanggal 20 Maret 1991, namanya diubah menjadi Perwakilan Kecamatan Medan Helvetia dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor: 50 tahun 1991 ditetapkan sebagai Kecamatan Medan Helvetia yang diresmikan pada tanggal 31 Oktober 1991 yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Helvetia, Helvetia Tengah, Helvetia Timur, Dwi Kora, Cinta Damai, Tanjung Gusta dan Sei Sikambing CII. Secara geografis Kecamatan Medan



Helvetia berada di 27 meter di atas permukaan air laut dan terletak diantara 03°– 2' LU, 62°– 41' LS dan 98°– 39' BT dengan luas wilayah 12.639 jiwa/km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 166.332 jiwa.

Tabel 1. Batas Wilayah Kecamatan Medan Helvetia

No	Batasan	Batas-Batas Wilayah
1	Utara	Kabupaten Deli Serdang
2	Selatan	Kecamatan Medan Sunggal
3	Barat	Kecamatan Medan Sunggal
4	Timur	Kecamatan Medan Barat dan Kecamatan Medan Petisah

*Sumber: Pemko Medan 2022*

Kementrian Sosial bersama Perum Bulog bekerja sama dalam program bantuan pangan non tunai yang dimulai sejak 2017. Hal ini merupakan transformasi dari program sebelumnya, yaitu program subsidi beras sejahtera (rastra), Program tersebut merupakan transformasi dari program raskin yang sudah dilaksanakan sejak 2002. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang. Maka dari itu, pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Medan memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu berupa beberapa program dari pemerintah termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya disebut Beras Sejahtera (Rastra).

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) setiap bulannya melalui akun elektronik atau yang biasa disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang disebut E-Warong yang telah bekerja sama dengan Bank Himpunan Bank Negara (Himbara). Penerima Bantuan Pangan Non Tunai setiap bulannya mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Tabel 2. Jumlah Masyarakat Miskin di Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2021

Rumah Tangga	9921
Kepala Rumah Tangga	37570

Tetapi berdasarkan hasil penelitian, ternyata di Kecamatan Medan Helvetia penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum sesuai dengan harapan, ini dikarenakan masih ada masalah diantaranya penyaluran BPNT masih belum tepat sasaran dikarenakan yang layak mendapatkan BPNT tidak semua dapat dan ada beberapa warga yang sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan bantuan, serta kurangnya anggaran yang membuat masyarakat tidak semua mendapatkan bantuan.

Untuk mengetahui lebih rinci, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin di (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Medan Helvetia)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Medan Helvetia)?
2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Fakir Miskin.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Medan Helvetia).
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Fakir Miskin.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan ilmu yang berguna khususnya tentang penyaluran BPNT.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Peran

Peran atau peranan dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dari orang-orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu dalam masyarakat, bisa tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan merupakan wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kedudukan tertentu adalah pemegang peran (*roleaccupant*). Hak sebenarnya adalah wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis, peran adalah aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang yang menduduki atau menempati suatu jabatan dan yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran ini dengan baik, secara alami ia akan berharap bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan keinginan lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadirannya dalam menentukan suatu proses kesinambungan.

Menurut Kozier Barbara, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang berdasarkan posisinya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh kondisi sosial baik di dalam maupun di luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang



dalam situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa.

Menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan masyarakat.

Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003:55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.

Menurut Abu Ahmadi (1982), peran adalah seperangkat harapan manusia tentang bagaimana seharusnya individu bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu sesuai dengan status dan fungsi sosialnya. Menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat.

Sedangkan menurut SoerjonoSoekanto (2015:210)Peranan atau (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.

Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Diperlukan peranan dari pemerintah yang secara optimal dan mendalam demi memberdayakan masyarakat, oleh sebab itu dibawah ini diuraikan beberapa peran pemerintah yang dimaksud Yusuf (2014), yaitu:

1. Pemerintah sebagai regulator

Pemerintah sebagai regulator yaitu harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah harus memberikan acuan dasar masyarakat sebagai alat untuk mengatur semua kegiatan pelaksanaan pemberdayaan

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator memberikan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah yang kemudian menggerakkan partisipasi masyarakat ketika ada hambatan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan dan menjaga dinamika pembangunan di daerah. Peran pemerintah yang

dimaksud adalah memberikan nasehat dan bimbingan secara mendetail kepada masyarakat. Biasanya, dukungan diberikan oleh tim penyuluh maupun badan tertentu yang bertanggung jawab untuk pelatihan.

### 3. Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta pendanaan atau permodalan bagi masyarakat yang diberikan pemberdayaan.

## 2.2 Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial terbagi menjadi 2, yaitu Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Daerah Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, sedangkan Dinas Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas, Dinas sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial

4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada awalnya, Dinas Sosial Kota Medan bergabung dengan Dinas Tenaga Kerja yang disebut Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) hingga tahun 2016. Setelah terbitnya Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2016 Kota Medan tentang pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota nomor 1 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Peraturan Daerah Kota Medan maka pada tahun 2017 Dinas Sosial Kota Medan berdiri secara mandiri dan pelaksanaan pekerjaan diatur dalam peraturan Walikota Medan nomor 35 tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi.

Dinas Sosial mempunyai beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang Umum (Sekretariat)
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Dari beberapa bidang tersebut, Bidang Penanganan Fakir Miskin yang berperan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

### **2.3 Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam lingkup pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu kepada setiap lembaga penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tentang Kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lainnya yang didirikan semata-mata untuk tujuan kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pejabat, pegawai, agen dan setiap orang yang bekerja dalam organisasi penyelenggara dan bertugas melaksanakan suatu tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik.

Menurut KBBI pelayanan memiliki tiga makna, yang pertama perihal atau cara melayani, yang kedua usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), yang ketiga kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu, menyikapi, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang.

Kata dasar “Pelayanan” menurut Pasolong (2010:128), didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan definisi “Pelayanan Publik” menurut Mahmudi (2010:223), adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi lain pelayanan publik menurut HarbaniPasolong (2007:128) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu



kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Sementara Sinambela (2014:5) menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

#### **2.4 Fakir Miskin**

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber pendapatan atau sumber mata pencaharian, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang baik karena ketidakmampuan negara atau masyarakat untuk memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Menurut Schiller (1999), kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas. Menurut Levitan (1996), kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang dapat diterima secara universal. Menurut

Friedmann (1997), kemiskinan adalah ketidaksamaan memperoleh kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial.

#### 2.4.1 Faktor Terjadinya Kemiskinan

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut Kuncoro, yaitu:

1. Pada tingkat makro, kemiskinan muncul karena model kepemilikan sumber daya yang tidak merata mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata, masyarakat miskin hanya memiliki sumber daya terbatas yang berkualitas rendah.
2. Kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas yang rendah dan upahnya pun rendah
3. Kemiskinan adalah akibat dari perbedaan akses dan modal. Karena keterbatasan dan kurangnya akses, orang memiliki pilihan terbatas (bahkan tidak ada) untuk mengembangkan kehidupan mereka, kecuali melakukan apa yang perlu mereka lakukan sekarang (bukan apa yang perlu dilakukan). Jadi manusia memiliki batasan dalam pilihannya, yang menghambat potensi manusia untuk mengembangkan kehidupannya.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dikategorikan dalam beberapa hal berikut ini, yaitu:

- a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan secara global

Standar pendapatan perkapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jika produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya

seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan perkapita akan turun beriringan.

b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat

Faktor ini sangat penting dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan secara maksimal.

c. Biaya kehidupan yang tinggi

Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Pembagian subsidi pemerintah yang kurang merata akan menyulitkan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin. Juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin terbebani oleh pajak negara.

## 2.5 Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan sosial berupa bantuan non tunai pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara bulanan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk pembelian bahan pangan di pedagang bahan pangan atau *e-warong* yang bekerjasama dengan bank.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan melalui metode non tunai, dimana bantuan tersebut merupakan kebutuhan pokok seperti beras dan telur. Program Bantuan Pangan Non Tunai ini juga diperkuat dengan instrumen Presiden Republik Indonesia (RI) dan Kabinet berkenaan dengan keuangan inklusif yang diselenggarakan pada 26 April 2016, dengan ketentuan bantuan sosial dan subsidi tidak disalurkan tunai agar penyimpangan dari target program BPNT tidak terjadi.

Adapun tujuan dari Bantuan Pangan Non Tunai adalah:

1. Mengurangi beban pengeluaran dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Manfaat dari Bantuan Pangan Non Tunai adalah:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, serta sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
3. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai.

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro yang berpengalaman dalam usaha menjual telur dan beras.

#### Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

1. Penyiapan data penerima manfaat
2. Pengiriman pemberitahuan ke KPM serta sosialisasi dan edukasi
3. Registrasi dan aktivasi penerima manfaat oleh bank penyalur
4. Penyaluran bantuan melalui rekening bank
5. Pemanfaat KKS di e-warong untuk memperoleh beras ataupun telur.

#### 2.6 Penelitian Relevan

Berdasarkan judul penelitian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dilakukan oleh peneliti lain. Oleh sebab itu, dibawah ini akan penulis kemukakan beberapa penelitian yang dilakukan peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Relevan

Nama	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kuswatun Khasanah (2020)	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.	Kualitatif	Pengkajian Topik. Teknik Pengumpulan Data. Teknik Analisis Data.	Tempat Riset. Sumber Data.



Rohana Tiara dan Mardianto (201	Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang	Metode Campuran, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif	Teknik Pengumpulan Data.	Tempat Riset. Sumber Data.
Aslihal Anwar	Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang	Deskriptif Kualitatif	Metode Penelitian. Teknik Pengumpulan Data.	Tempat Riset. Sumber Data. Teknik Analisis Data.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

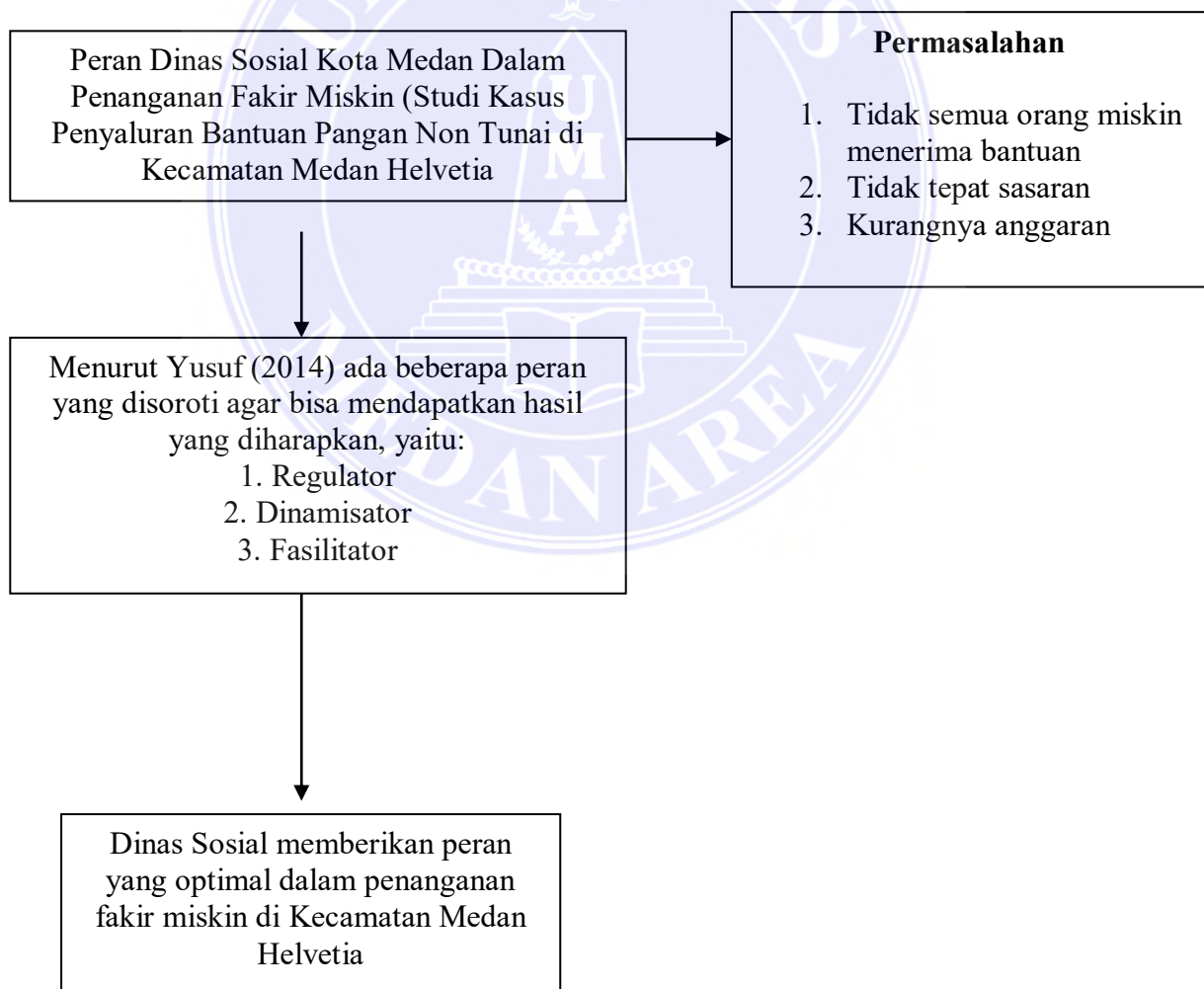
Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, sebelum mulai melakukan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian. Dalam hal ini Dinas Sosial mempunyai permasalahan yaitu tidak semua orang miskin menerima bantuan dikarenakan data tidak akurat yang menyebabkan ketidaktepatannya sasaran serta kurangnya anggaran yang membuat penerima tidak semuanya dapat bantuan. Terkait dengan ini, maka peran pemerintah yang dikemukakan Yusuf (2014) peran yang disoroti adalah sebagai Regulator, Fasilitator, dan Dinamisator agar bisa mendapatkan hasil yang diharapkan yaitu Dinas Sosial memberi peran yang optimal.



Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bagan berikut:

### Bagan 1. Kerangka Pemikiran





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang didapat lalu dikumpulkan, biasanya informasi tersebut berupa kata. Data yang berupa kata tersebut kemudian dianalisis lalu dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap keyakinan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Dengan demikian, proses penelitian kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar dan kaidah-kaidah pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian diinterpretasikan.

Maka, penelitian ini akan menggambarkan objek sebagaimana adanya, sesuai dengan keadaan di lapangan tanpa melebih-lebihkan dari penulis. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Medan Helvetia (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai)

## 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat melakukan penelitian untuk memperoleh data penelitian. Penulis memilih lokasi di Dinas Sosial Kota Medan sebagai tempat penelitian yang beralamat di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20217.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 4. Jadwal dan Waktu Penelitian

NO.	KEGIATAN	BULAN/TAHUN					
		Okt- Des 21	Jan- 22	Feb- Jun 22	Jul- Okt 22	Nov 22- Feb 23	Mar- Mei 23
1.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Pengambilan Data Survey						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Seminar Hasil						
6.	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi						
7.	Pengajuan Sidang Meja Hijau						
8.	Sidang Meja Hijau						

## 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian sangat memiliki peranan yang penting dalam pengambilan data atau informasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian. Informan penelitian ini meliputi informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai latar belakang

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam masalah yang diteliti. Informan utama adalah informan yang ditentukan berdasarkan pengetahuan umum pertimbangan masalah, sedangkan informan tambahan adalah informan yang berhubungan secara langsung atau merasakan langsung. Seseorang yang memberikan informasi ini disebut juga informan. Informan adalah orang seharusnya memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di latar belakang.

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi informan di penelitian ini adalah:

1. Informan Kunci : Ibu Bungamin br. Surbakti selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan.
2. Informan Utama : Ibu Rizki Putri Amalia selaku Pegawai Dinas Sosial Kota Medan, dan Bapak Abdillah Harja Purba, S.STP, Msi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Medan Helvetia.
3. Informan Tambahan : Ibu Siti Aminah dan Ibu Rosmawati selaku Masyarakat Kecamatan Medan Helvetiayang menerima BPNT dan Ibu Atik selaku yang tidak menerima BPNT.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi pendukung dan fakta di lapangan untuk keperluan penelitian.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data lapangan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda tergantung jenis penelitiannya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.

### 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menanyakan sesuatu kepada responden, caranya dengan berbicara secara tatap muka. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara dengan pedoman wawancara umum ini, wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum dan mencakup topik-topik yang perlu diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Data berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara. Dokumentasi mengacu pada kegiatan tertentu dalam



bentuk pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Dokumentasi dapat dalam berbentuk teks atau gambar.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menelaah dan mengumpulkan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya dalam unit, merangkumnya, menyusunnya menjadi model, memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Akan dipelajari dan ditarik kesimpulan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi Data adalah sarana untuk memilih, memusatkan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data, misalnya catatan lapangan, dokumen, arsip dan lain-lain. Sedangkan untuk proses penekanan, mempersingkat, menghapuskan yang tidak perlu, memilih fokus dan menyusun data untuk menarik kesimpulan.

#### 3. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menulis laporan penelitian agar dapat dipahami dan dianalisis. Penyajian Data bisa dapat dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel, grafik dan sejenisnya. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya suram atau abu-abu sehingga setelah diteliti menjadi jelas bahwa itu mungkin merupakan kausal, interaktif, hipotesis, atau teori.

### 3.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi (2001:121) adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Definisi konseptual pada dasarnya digunakan sebagai penjelasan yang singkat mengenai konsep yang akan digunakan sebagai perspektif dalam suatu penulisan. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

#### 2. Penanganan Fakir Miskin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat atau ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

### 3. Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan sosial berupa bantuan non tunai pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara bulanan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk pembelian bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warong yang bekerjasama dengan bank. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai setiap bulannya mendapatkan

sebesar Rp. 200.000,- melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan seperti telur ataupun beras yang bisa dicairkan di *e-warong*. Bantuan tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang atau komoditi lain.

### 3.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang berguna untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel yang di amati atau di teliti dan bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen (Notoatmodjo,2018).

Kegiatan yang dilakukan disini adalah membuat konsep dengan mengelompokkan ke dalam variabel agar dapat diukur penelitian ini yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Medan Helvetia) berdasarkan konsep tersebut yang bertujuan untuk melihat peran Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin. Adapun indikator dari pengukuran peran Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin (studi kasus penyaluran BPNT di Kecamatan Medan Helvetia) adalah:

1. Regulator, Pemerintah sebagai regulator yaitu harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.
2. Dinamisator, Pemerintah sebagai dinamisator memberikan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah yang kemudian menggerakkan partisipasi masyarakat ketika ada hambatan dalam proses

pembangunan untuk meningkatkan dan menjaga dinamika pembangunan di daerah.

3. Fasilitator, Pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta pendanaan atau permodalan bagi masyarakat yang diberikan pemberdayaan.



“Gak tau saya sesuai apa nggak, mungkin sesuai tapi gak tau ngalirnya kemana.” (23 Oktober 2022, Pukul 10:40).

Dari pernyataan di atas, masyarakat yang menerima bantuan dan maupun masyarakat yang tidak menerima bantuan mengatakan bahwa dana yang dikeluarkan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan data yang ada.

Selanjutnya pernyataan mengenai skema proses penyaluran, Ibu Bungaminbr. Surbakti selaku Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin mengatakan:

“Untuk proses penyalurannya itu dari *e-warong* atau agen brilink yang menangani penyaluran BPNT tersebut.” (1 Agustus 2022, Pukul 11:10).

Pernyataan dari Ibu Rizki Putri Amalia, selaku Pegawai di Dinas Sosial Kota Medan mengenai skema proses penyaluran mengatakan:

“Ada, prosesnya dari Kementerian Sosial, ke Bank HIMBARA, dan dari Bank HIMBARA lanjut ke *e-warong* atau agen Brilink penyalur BPNT.” (3 Agustus 2022, Pukul 10:50).

Adapun pernyataan Bapak Abdillah Harja selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyatakan:

“Dari *e-warong* yang khusus menangani penyaluran BPNT, jadi warga yang mendapatkan BPNT bisa langsung mengambil bantuan tersebut di *e-warong* terdekat.” (26 Desember 2022, Pukul 14:00).

Hal itu didukung oleh pernyataan dari Ibu Siti Aminah, selaku masyarakat penerima BPNT mengenai proses penyaluran bantuan mengatakan:

“Awalnya diberitahu oleh ketua yang berhubungan langsung dengan Dinas Sosial, lalu diumumkan di grup kalo dia udah dapat info dari Dinas Sosial kalo BPNT udah cair/keluar dan udah diambil kepling. Dan kebetulan



warungnya ada Brilink atau *e-warong* di lingkungan tersebut, dan kebetulan juga *e-warong* itu ada di rumah kepling. Lalu ngambil sembako nya di rumah kepling, kami kasih kartu nya ke pemilik *e-warong* tersebut untuk ditukarkan saldo tersebut menjadi sembako.” (20 Agustus 2022, Pukul 15:25).

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Rosmawati, selaku masyarakat penerima BPNT mengatakan:

“Kami yang menerima bantuan dibuatkan grup di *whatsapp*, disitu isinya ada petugas yang suka ngasihtau kalo bantuan udah cair. Jadi kalo udah cair kami datang ke *e-warong*, kami kasih kartu merah itu, lalu ditukarkan menjadi sembako.” (21 Agustus 2022, Pukul 14:40).

Beralih kepada Ibu Atik selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan, mengatakan:

“Dari yang saya liat mereka ngambil di agen brilink, agen nya cuma beda 5 gang aja dari sini. Jadi disitu tempat mereka ambil sembako.” (23 Oktober 2022, Pukul 10:45).

Dari pernyataan di atas mengenai proses penyaluran BPNT, pihak Dinas Sosial mengatakan dari Kemensos, lalu ke Bank HIMBARA, selanjutnya dari Bank HIMBARA lanjut ke *e-warong* atau Agen Brilink penyalur BPNT. Bank HIMBARA sendiri adalah sebutan untuk empat Bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI serta Bank BTN. Masyarakat penerima BPNT juga mengatakan jika bantuan sudah cair maka akan diberitahu lalu masyarakat datang ke *e-warong* membawa KKS untuk menukarkan saldo KKS menjadi sembako.

Dari hasil wawancara informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan fakir miskin sebagai fasilitator dalam pendanaan bantuan, pihak Dinas Sosial mengatakan belum sesuai dengan data yang ada. Untuk skema penyaluran bantuan pihak Dinas Sosial mengatakan, awal

prosesnya dari Kemensos, lalu ke Bank HIMBARA, selanjutnya ke *e-warong*, dan setelah itu tersalurkan ke masyarakat.

## 4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

### 1. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung pelaksanaan program BPNT ini ialah dukungan finansial yang terus mengalir dari Kementerian Sosial RI yang terus mengalir pada saat pencairan dan mencukupi sehingga dapat mentukan kesuksesan tujuan. Dimana tujuan tersebut ialah meringankan beban KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Rosmawati selaku masyarakat penerima BPNT, mengatakan:

“Alhamdulillah saya sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, apalagi saya cuma bekerja sebagai tukang cuci di rumah-rumah orang yang gajinya tidak seberapa.” (21 Agustus 2022, Pukul 14:45).

Selanjutnya Ibu Bungaminbr. Surbakti selaku Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM), mengatakan:

“Ya tentunya karena anggaran dari pemerintah sangat mencukupi sehingga penyaluran bantuan pun lancar terlaksana.” (1 Agustus 2022, Pukul 11:20).

Dalam pelaksanaan program BPNT, proses pencairan merupakan hal terpenting. Oleh karena itu dengan anggaran yang cukup, pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai tujuan program dapat meningkat.

### 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam proses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Medan Helvetia antara lain adanya saldo Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) yang kosong, sehingga KPM tersebut tidak bisa menukarkan bantuan. Akurasi data KPM yang belum akurat yang membuat faktor penghambat itu terjadi. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Bungaminbr. Surbakti selaku Kepala Seksi Bidang PFM, menyatakan:

“Seperti yang saya katakan tadi, kartu saldo yang kosong itu yang menjadi penghambatnya. Sehingga masyarakat yang menerima saldo kosong diharapkan melapor kepada petugas setempat agar datanya diperbaiki.” (1 Agustus 2022, Pukul 11:25).

Ibu Siti Aminah, selaku masyarakat penerima BPNT mengatakan:

“Ya waktu saldo saya kosong itu saya melapor langsung ke kepling, setelah itu kepling meminta data saya dan saya akhirnya mendapatkan bantuan lagi.” (20 Agustus 2022, Pukul 15:30).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, faktor penghambat yang terjadi adalah adanya saldo KPM yang kosong, selain itu ada juga di beberapa kecamatan yang lokasi *e-warongnya* jauh dari beberapa masyarakat sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat penerima bantuan. Ini yang menjadi penghambat masyarakat ketika ingin mengambil bantuan jika tidak ada kendaraan. Selain itu faktor penghambat lainnya yaitu, masih adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terjadi, yang membuat masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut menjadi tidak dapat bantuan dikarenakan namanya digeser oleh pihak tertentu yang merugikan pihak lain.

#### 4.2.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aslihal Anwar pada tahun 2020 yang berjudul “Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang).”.dengan

menggunakan indikator, yaitu: penyaluran tepat sasaran, dan kendala penyaluran bantuan dengan hasil tidak tepat sasaran.

Persamaan skripsi saya dengan Aslihal Anwar yaitu, metode penelitian, teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaan skripsi saya dengan Aslihal Anwar yaitu, beliau meneliti di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, sedangkan saya melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Medan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kuswatun Khasanah pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal”, ia menggunakan 6 indikator keberhasilan pelaksanaan program BPNT yaitu: tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI tahun 2012.

Persamaan skripsi saya dengan Kuswatun Khasanah yaitu, pengkajian topik, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Sedangkan perbedaan skripsi saya dengan Kuswatun Khasanah adalah beliau meneliti implementasi program BPNT di Kelurahan Ketapang dengan hasil bahwa implementasi program BPNT di Kelurahan Ketapang ini belum dapat memenuhi 6T indikator ketepatan BPNT dan hanya mampu memenuhi 5 indikator. Sedangkan saya melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Medan (Penyaluran BPNT di Kecamatan Medan Helvetia) dengan

menggunakan teori Yusuf (2014) yaitu regulator, dinamisator, fasilitator dengan hasil yaitu peran Dinas Sosial Kota Medan belum cukup optimal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rohana Tiara dan Mardianto pada tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang”, ia menggunakan 3 ukuran efektivitas, yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Dengan hasil proses pelaksanaan Program BPNT di Kota Palembang belum efektif.

Persamaan skripsi/jurnal saya dengan Rohana Tiara dan Mardianto adalah teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaan skripsi/jurnal saya dengan Rohana Tiara dan Mardianto adalah beliau meneliti keefektivitasan program BPNT menggunakan 3 indikator dan hasilnya belum efektif, sedangkan saya menggunakan teori peran dari Yusuf (2014) dengan hasil yaitu Peran Dinas Sosial Kota Medan belum cukup optimal.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Sosial masih kurang optimal, dan perlu ada peningkatan, hal ini di analisis dari teori Yusuf (2014) yaitu: Peran pemerintah sebagai *regulator* dalam menangani fakir miskin, kebijakan bantuan cukup terlaksana dengan baik tetapi masih ada pendataan yang belum sesuai, dilihat dari masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan. Peran pemerintah sebagai *dinamisator* dalam menangani fakir miskin, penerapan Dinas Sosial belum cukup baik dalam penyaluran BPNT. Peran pemerintah sebagai *fasilitator* dalam pendanaan dan penanganan fakir miskin belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih belum sesuai dengan data yang ada.
2. Faktor pendukung pelaksanaan program BPNT ini ialah dukungan finansial yang terus mengalir dari Kementerian Sosial RI, petugas Dinas Sosial juga aktif dalam melakukan tugasnya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu pendataan yang tidak baik, serta masih adanya oknum kecamatan yang melakukan nepotisme.

#### 5.2 Saran



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan mengenai Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Medan Helvetia). Maka dari itu penulis merekomendasikan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah terkhusus Dinas Sosial Kota Medan diminta melakukan pendataan secara rutin sehingga masyarakat miskin dapat tercatat sebagai calon penerima bantuan agar pendataan fakir miskin di Kota Medan terkhusus Kecamatan Medan Helvetia tepat sasaran.
2. Kepada Dinas Sosial agar tidak melakukan pendataan secara KKN serta Kelurahan, Kecamatan, Kepling tidak mengutamakan orang terdekat seperti keluarga, lurah, atau lain sebagainya sehingga menghambat misi penuntasan kemiskinan di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggito, A. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak.

Azis, d. H. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Bogor.

Poerwodarminta. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Raco, R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.

Siagian. (1992). Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Sinambela, P. (2014). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Grasindo.

Soekanto, S. &. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, S. (1997). Sosiologi Suatu Pengantar. Bandung: Yayasan Penerbit UI.

Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

### Internet

*Bappenas*. Dipetik Oktober 23, 2021, dari <https://www.bappenas.go.id/files/4713/5229/9515/bab2snpkbaru11juni>

*Dinas Sosial*. Dipetik Oktober 16, 2021, dari <https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read3/SEJARAH.html>

*Kemensos Pusdatin*. Dipetik Oktober 18, 2021, dari <https://pusdatin.kemensos.go.id/>

*Ombudsman*. Dipetik Oktober 22, 2021, dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>

*Pemko Medan Helvetia*. Dipetik Oktober 17, 2021, dari <https://medanhelvetia.pemkomedan.go.id/web/site/menu/Profil/read3/Gambaran-Umum.html>

Yusuf, I. (2014). Dipetik Oktober 23, 2021, dari <http://www.iyayusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintah-dalam-html>

### **Skripsi / Jurnal**

Ikhsan, T. M. (2019). Hubungan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Gampong Kutatinggi, Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, IV*, 4.

Kuswatun, K. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. *Skripsi* .

M., H. P. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Universitas Negeri Padang, II (1)*, 60-68.

Rohana, T. M. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. *Universitas Sriwijaya, III (1)*, 37-46.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Peraturan Daerah No. 15/2016 Kota Medan tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota No. 1/2017 tentang Susunan Organisasi Peraturan Daerah Kota Medan.

Peraturan Walikota No. 35/2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi.

Undang-Undang No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara informasi penelitian di Dinas Sosial Kota Medan:

- A. Daftar pertanyaan kepada pihak Dinas Sosial Kota Medan
  1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Medan dalam membuat kebijakan BPNT?
  2. Apakah kebijakan tersebut sudah efektif?
  3. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penerapan BPNT?
  4. Apakah ada hambatan dalam dalam penerapan BPNT?
  5. Bagaimana cara Dinas Sosial dalam menanggulangi/menanggapi hambatan yang terjadi?
  6. Darimana dana bantuan fakir miskin berasal? Dan apakah dana bantuan untuk BPNT sudah keluar sesuai dengan data yang ada?
  7. Apakah ada skema dalam proses penyaluran BPNT?
- B. Daftar pertanyaan kepada pihak Kecamatan Medan Helvetia
  1. Bagaimana peran Kecamatan Medan Helvetia dalam membuat kebijakan BPNT?
  2. Apakah kebijakan tersebut sudah efektif?
  3. Bagaimana peran Kecamatan Medan Helvetia dalam penerapan BPNT?
  4. Apakah ada hambatan dalam penerapan BPNT?
  5. Bagaimana cara Kecamatan Medan Helvetia dalam menanggulangi/menanggapi hambatan yang terjadi?
  6. Darimana dana bantuan fakir miskin berasal? Dan apakah dana bantuan BPNT sudah keluar sesuai dengan data yang ada?
  7. Apakah ada skema dalam proses penyaluran BPNT?
- C. Daftar pertanyaan kepada masyarakat
  1. Bagaimana tanggapan anda terhadap kebijakan program BPNT dari pihak Dinas Sosial?
  2. Apakah menurut anda kebijakan tersebut sudah efektif?
  3. Bagaimana menurut anda peran Dinas Sosial dalam penerapan BPNT?
  4. Apakah ada hambatan yang terjadi selama menerima bantuan?
  5. Jika anda mengalami kendala dalam proses pengambilan bantuan apakah ada pihak Dinas Sosial yang membantu?
  6. Menurut anda darimana dana bantuan berasal? Apakah sesuai?
  7. Bagaimana proses anda saat mencairkan BPNT di Agen Brilink?



## LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Ibu Bungaminbr. Surbakti selaku Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin.



Lampiran 2. Foto bersama dengan Ibu Bungaminbr. Surbakti selaku Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin.



Lampiran 3. Wawancara dengan Ibu Rizki Putri Amalia selaku Pegawai di Dinas Sosial Kota Medan.



Lampiran 4. Foto bersama dengan Ibu Rizki Putri Amalia selaku Pegawai di Dinas Sosial Kota Medan.





Lampiran 5. Foto bersama dengan Bapak Abdillah Harja Purba, S.STP, Msi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.



Lampiran 6. Foto bersama dengan Ibu Atik selaku masyarakat yang tidak menerima BPNT.



Lampiran 7. Wawancara dengan Ibu Siti Aminah selaku masyarakat penerima BPNT



Lampiran 8. Foto bersama dengan Ibu Siti Aminah selaku masyarakat penerima BPNT.

